

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemitraan pengelolaan pariwisata di Gunung Galunggung merupakan terobosan untuk menangani atau membantu dalam pengelolaan pariwisata yang menjadikan kekuatan dalam upaya meningkatkan pendapatan pada sektor pariwisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan PT.Perhutani aspek penting dalam menjalani kemitraan memiliki prinsip atau kunci dalam kemitraan yaitu ada prinsip kesetaraan, prinsip manfaat bersama (mutual benefit) dan prinsip keterbukaan yang akan berdampak dalam meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang meliputi dari Retribusi dengan melalui arus kunjungan dan realisasi target pendapatan. Adapun pengelolaan pariwisata di Obyek Wisata Gunung Galunggung yaitu :

a. Pengelolaan Obyek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemitraan pengelolaan pariwisata di Gunung Galunggung merupakan terobosan untuk menangani atau membantu dalam pengelolaan pariwisata yang menjadikan kekuatan dalam upaya meningkatkan pendapatan pada sektor pariwisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan PT.Perhutani. Dalam hal pengelolaan Obyek Wisata Gunung ini memiliki 2 pengelola yang mempunyai kewajiban untuk merawat dan melestarikan Obyek wisata tersebut dimana

hasil penelitian menyebutkan bahwa ada Pembentukan struktur baru dalam tata kelola yang di laksanakan di obyek wisata Gunung Galunggung. Pelaku usaha dibedakan menjadi dua pihak, yaitu pihak DISPARPORA yang diwakilkan oleh KOMPEPAR (bak rendam air panas) dengan daerah meneglola di daerah milik Pemda dan KOPARGA dibawah naungan PT. Perhutani dengan daerah pengelolaan di lahan milik PT Perhutani (kawah gunung galunggung).

Maka dari itu ada pembagian pungutan Retribusi antara Perhutani dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga yang diatur dalam Perda Kabupaten Tasikmalaya No.9 tahun 2011 dan SK Adm. Perhutani/ KPH Tasikmalaya No 33/kpts/TSM/III/2014 yaitu retribusi sebesar Rp 3000 untuk wilayah pengelolaan Perhutani dan untuk wialayah Pengelolaan Dinas pariwisata, Pemuda dan olahraga sebesar Rp 3000. Serta ada pungutan sebesar Rp 500 untuk jasa asuransi

b. Prinsip Kemitraan dalam pengelolaan di Objek wisata Gunung Galunggung

Terkait kemitraan pengelolaan pariwisata guna meningkatkan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya kemitraan antara DISPARPORA, PT. Perhutani dengan masyarakat sudah berjalan dengan baik sesuai dengan pemaparan diatas namun ada beberapa keluhan atau permasalahan tapi hal tersebut tidak menjadi hambatan utama dalam proses upaya pengelolaan pariwisata. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil temuan yang didapat yaitu proses kemitraan yang menggambarkan bahwa kemitraan yang di lakukan oleh DISPARPORA, PT. Perhutani dengan Masyarakat dalam kegiatan pengelolaan

pariwisata di Gunung Galunggung sudah berjalan baik dengan adanya Surat perjanjian melalui M.O.U dan Kontrak Kerja dengan pihak Masyarakat

Dari analisis hasil temuan, kegiatan kemitraan di Objek wisata Gunung Galunggung ini dijalankan berdasarkan tiga prinsip lingkup kemitraan dan kerjasama aspek prinsip kunci terjalannya kemitraan yaitu :

1. Prinsip kesetaraan

Kemitraan antara masing masing pihak baik pihak pemerintah, PT Perhutani dan masyarakat yang bermitra sudah sama-sama sejajar kedudukannya dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama dimana kemitraan ini sudah memiliki struktur dalam organisasi kemitraan tersebut terlihat ketika alur koordoinasi yang sudah dibangun oleh masing masing pihak.

2. Prinsip Azas Manfaat Bersama (*mutual benefit*)

Manfaat yang didapatkan oleh DISPARPORA yaitu adanya penyerapan tenaga kerja, dapat membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di desa serta membantu masyarakat guna meingkatkan kesejahteraan. Manfaat yang didapat oleh pihak PT. Perhutani yaitu perihal bermitra dengan Koparga merasa terbantu dalam pengelolaan khususnya mengelola kebersihan dan keamanan lingkungan wisata gunung galunggung di wilayah KPH perhutani. Manfaat bagi Kompepar maupun Koparga yaitu terbantunya dalam taraf hidup dalam pemberdayaan masyarakat atau perlibatan pengelolaan pariwisata sehingga pihak mitra mendapat pekerjaan dan otomatis mendapatkan tambahan pemasukan dengan system kepercayaan melalui kontrak kerja dan M.O.U yang disepakati bersama adapun manfaat yang dirasakan dalam pembagian hasil pengelolaan

Pariwisata yaitu pihak Pemerintah Kabupaten dan PT.Perhutani memiliki kesepakatan bagi hasil yaitu 70% dan Masyarakat (Kompepar dan Koparga) sebesar 30%.

3. Prinsip Keterbukaan

Dalam prinsip ini, kegiatan kemitran sudah berjalan cukup terbuka terkait dengan informasi mengenai kegiatan pengelolaan pariwisata hal tersebut dirasakan oleh pihak PT. Perhutani dengan KOPARGA yang menilai kemitraan ini sudah berjalan secara transparan. Namun berbeda dengan DISPARPORA yang bermitra dengan KOMPEPAR, meskipun secara keseluruhan dinilai cukup dalam mengelola pariwisata namun ada keluhan terkait dengan kepercayaan mengelola lahan parkir bahwa pihak mitra menilai kepercayaan itu akan berdampak terhadap keterbukaan dan hal ini masih dirasa kurang dalam system pengelolaan yang di berikan oleh DISPARPORA beberapa kegiatannya terlebih mengenai kerjasama bersama pihak lain yaitu DISHUB untuk mengelola parkir sekitaran area lahan yang dikelola Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan kemitraan berjalan sesuai prinsip yang menunjang suksesnya dalam bermitra, karena dengan ketiga prinsip ini menunjukkan hasil yang cukup baik dalam membangun kemitraan terlebih kemitraan ini akan berdampak terhadap system pengelolaan yang dilaksanakan di obyek wisata Gunung Galunggung guna upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam sektor wisata dan pembangunan pariwisata di Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya terlebih pada prinsip kesetaraan dan prinsip azas manfaat bersama yang memberikan hasil yang signifikan bahwa

kemitraan di jalan kan dengna baik namun terlihat hasil dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan ada hal yang memberika data terkait dengan keprcayaan terhadap pengelolaan hal ini akan terlaksana ketika dinas pariwisata membuat kebijakan atau sosialisasi dengan baik anatra pihak mitra dengan pihak Pemerintah Kabupaten.

c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kemudian terkait dengan Pendapatan Asli Daerah dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata di Obyek wisata Gunung galunggung sudah cukup baik terlihat pada peningkatan jumlah retribusi yang diberikan Obyek Wisata Gunung Galunggung tiap tahunnya. Meskipun mengalami penurunan sedikit namun hal tersebut pihak pemerintah sudah memberikan strategi untuk menangani terkait Pendapatan Asli Daerah terutama dalam sektor pariwisata khususnya di Obyek wisata Gunung Galunggung.

Terlebih yang menjadi sorotan fokus pemerintah kabupaten yaitu Obyek Wisata Gunung Galunggung yang memiliki daya Tarik yang luar biasa dibanding obyek wisata yang lain terlihat pada data realisasi pendapatan asli daerah setiap tahun mengalami peningkatan khusus pada 3 tahun terakhir ini antara target dengan realisasi sudah melampaui dari jumlah target hal tersebut Gunung Galunggung tercatat pada tahun 2017 per desember mencapai angka Rp **616.754.000 pemasukan pada PAD sektor pariwisata**. Dengan jumlah pengunjung 373,159 pengunjung yang datang di Obyek wisata Gunung Galunggung di tambah dengan hasil pendapatan wilayah Bak Rendam Air Panas Galunggung yang di kelola oleh pihak Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2017 tercatat per desember mencapai angka Rp 73.763.000 pemasukan pada PAD Kabupaten Tasikmalaya sektor Pariwisata dengan target pemasukan yaitu Rp 55.000.000.

Maka dapat diambil garis besar dengan hasil pendapatan tersebut tidak dipungkiri bahwa yang berpengaruh terhadap angka capaian pendapatan adalah dari sistem pengelolaan pariwisata dalam hal ini dapat terlihat dalam system pengelolaan pariwisata yang dilaksanakan di Obyek Wisata Gunung galunggung terdapat kemitran untuk mencapai targret pendpatannya. Dari hasil penelitian memberikan hasil yang signifikan terhadap tatakelola serta sistem kegiatan kemitraan yang dilakukan guna mendapatkan hasil yang baik bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmlaaya hal tersebut terlaksana dan terlihat jelas dengan hasil yang didapat berbagai aspek yang dilaksanakan menjabarkan bahwa kemitraan ini harus di kembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang di sepakati bersama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak Pemerintah Kabupaten (Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan UPT wisata Gunung Galunggung).

Diharapkan pihak DISPARPORA untuk seentiasa merumuskan kebijakan-kebijakan mengenai pembangunan pariwisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya khusus nya di gunung galunggung Terkait dengan kejelasan program yang dilaksanakan seharusnya pihak pemerintah lebih

memperhatikan program yang akan dilaksanakan terlebih program pelaksanaan pengelolaan pariwisata yang dilaksanaka pihak mitra supaya pihak mitra akan lebih giat dalam membantu kinerja pengelolaan pariwisata dan saling terbuka antara pihak itu harus di utamakan karena dengan keterbukaan ini lah yang akan menimbulkan kemitraan yang akan berdampak terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pihak mitra.

Saling percaya juga masih kurang terhadap mitra seharusnya pihak pemerintah memiliki inisiatif atau pembuatan kebijakan terkait pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar Gunung Galunggung terlebih dalam pengelolaan lahan parkir yang memberikan tugas nya kepada DISHUB. Dengan berbagai masukan terhadap pengelolaan bagian lahan Pemerintah kabupaten bahwa pihak pemerintah tidak bertindak tegas dan kurang memperhatikan pihak mitra dan bisa dikatakan kurang maksimal dalam pengelolaan lahan parkir karena kurang nya perhatian dan pemberdayaan pada pihak mitra .

Dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata di kabupaten tasikmlaya maka retribusi yang akan masuk kedalam pendapatan asli daerah juga diharapkan meningkat. Adapun yang haris dikembangkan yaitu dalam system konsep 3A wisata yang menjadi tugas pemerintah agar masyarakat lebih gencar lagi memperhatikan pariwisata dengn konsep 3A yang di jadikan tolak ukur tersebut yaitu Attraction atau atraksi berupa keindahan dan keunikan alam budaya, peninggalan budaya bangunan bersejarah, lalu ada konsep accessibility atau aksesibilitas adalah sarana dan infrasturktur untuk menuju destinasi seperti jalan raya, ketersediaan sarana transportasi, dan

rambu-rambu petunjuk sedang kan amenitas berkaitan dengna segala fasilitas pendukung seperti ketersediaan sarana untuk menginap, restoran atau warung dan segala fasilitas pendukung yang bias memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi.

Dengan adanya konsep 3A yang merupakan konsep pemerintah untuk menjadikan dayat Tarik wisata yang memberikan dampak terbaik bagi pengunjung wisata. Tidak hanya itu program pemerintah yaitu *wonderful Indonesia* merupakan produk pemerintah untuk memasarkan pariwisatanya dimata dunia, pemerintah kabupaten tasikmlaya seharusnya dapat memfasilitasi agar Gunung Galunggung dapat masuk ke dalam program tersebut, sehingga informasi dapat di akses ke seluruh dunia bagi calon pengunjung yang akan berkunjung ke wisata yang ada di Indonesia.

2. Responden

Diharapkan kepada responden yaitu pengunjung Obyek wisata Gunung Galunggung agar dapat menjaga kelstarian hutan yang menjadi daya Tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi ke Gunung Galunggung. Dengan terjaganya kelestarian alam maka pengunjung merasa nyaman dan akan mendatangi lagi ke obyek wisata tersebut meskipun sudah pernah datang untuk mrnikmati kesejukan udara pegunungan yang segar dengan harapan wisatawan mengulangi hal sama meskipun sudah mendatangi onyek wisata tersebut. Selain itu sebagai pengguna fasilitas juga mempunyai hak untuk mengkritisi apabila memang dirasa wisata gunung galunggung mempunyai kekurangan yang nantinya menjadi masukan dari

pengunjung itu dapat menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi pihak pengelola untuk menjadikan wisata Gunung Galunggung lebih baik lagi .